



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJO SEMEDI HARGO YUWONO
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
3. NHK : 813014

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.287.335.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/140 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 306 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. Tanah Seluas 3.811 m² di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 76.220.000
4. Tanah Seluas 4.428 m² di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 88.560.000
5. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. Tanah Seluas 2.073 m² di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 72.555.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.300.000

1. MOBIL, FORD RANGER DOUBLE CABIN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 46.400.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA CB15A1RRF M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



4. LAINNYA, MESIN SANGRAI KOPI WANGDI Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 24.600.000	
5. LAINNYA, MAKSINDO GRINDER KOPI HS-850 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000	
6. LAINNYA, MESIN TREADMILL ONE SPORTS 338 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.100.000	
7. MOTOR, GESITS/G1 SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.200.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 105.354.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 224.202.700
F. HARTA LAINNYA	Rp. 401.127.703
Sub Total	Rp. 2.129.319.403
III. HUTANG	Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 2.129.319.403

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.